

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mantan Presiden Soeharto yang pernah memimpin bangsa ini selama 32 tahun dan telah membangun bangsa ini hingga besar, namun di era kepemimpinannya tak luput dari berbagai kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta sifat kepemimpinan otoriternya yang sebenarnya bertolak belakang dengan pemerintahan demokrasi yang dipakai bangsa ini. Titik perbedaan antara pemerintahan demokratik dan otoriter bukan terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki, tetapi batasan-batasan yang dikenakan pada wewenang mereka.¹ Dari hal-hal di atas mengakibatkan efek yang masih dirasakan bangsa ini seperti pengembalian utang luar negeri yang jumlahnya teramat besar hingga masih membelit bangsa ini, kasus-kasus korupsi dan nepotisme yang akarnya mencengkram kuat bangsa ini dan bahkan dari kalangan bawah yang serba kekurangan hingga kalangan atas yang sudah mapan. Bahkan kondisi di atas menyisyaratkan bahwa korupsi dan nepotisme adalah budaya buruk bangsa ini sebagai warisan dari kepemimpinan Orde Lama yang masih dipertahankan pada kepemimpinan Orde Baru bahkan hingga jaman setelah reformasi seperti sekarang ini, karena masih membudayanya korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai bidang maka akan sangat sulit untuk diberantas.

¹ Wahdiyono, Farid, 1998. *Soeharto Lengser Perspektif Luar Negeri*, Edisi Terjemahan, Yogyakarta: LKIS, hal: 13.

Masih segar dalam ingatan Bangsa Indonesia atas kematian mantan Presiden RI yang kedua yakni Soeharto seorang mantan penguasa Orde Baru yang masih meninggalkan kasus hukum yang belum jelas serta menimbulkan kontroversi baik dalam media maupun masyarakat Indonesia. “Seperti yang diungkapkan Abdurahman Wahid, mantan Presiden RI, polarisasi telah tumbuh semakin tajam seiring dengan kematian Soeharto, sebagian ingin memaafkan, tak sedikit juga yang tetap menuntut proses hukum untuk Soeharto”²

Munculnya pendapat yang kontroversial ini akhirnya berimbas kepada berita yang dihasilkan oleh media massa, berbagai komentar dan analisis silih berganti menghiasi media untuk mengungkap lebih jelas seputar kontroversi kasus hukum Soeharto. Berita yang sampai kepada khalayak merupakan hasil rangkaian seleksi akhir dari peristiwa-peristiwa yang muncul dan dianggap oleh pihak media mempunyai nilai berita. Ditambah pula dengan pencabutan pemberlakuan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) oleh Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah pada saat perubahan kekuasaan pada tahun 1998, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Di mana bagi Indonesia sendiri pengekan pemerintah terhadap pers dimulai tahun 1846, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat ijin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya.³ Bahkan terus berlanjut pada era-era sebelum reformasi dengan nama yang berbeda tetapi tetap membatasi kebebasan pers yang ada. Dengan adanya era pers yang

² Koran Tempo edisi, 29 Januari 2008

³ Diperoleh dari <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0202/09/opi01.html> Browsing, *Masa Depan Kasus Hukum Soeharto Pasca Wafatnya Beliau*, 26 Februari 2008

terbuka seperti saat ini sangat dimungkinkan berita yang beredar dalam hari yang sama dan mengangkat fakta yang sama tetapi ketika dibaca mempunyai makna yang berbeda karena judul yang digunakan, *lead* yang dipakai, maupun susunan teks yang berbeda sistematikanya. Fenomena ini juga didorong oleh lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan semangat utamanya mengenai kemerdekaan pers serta lahirnya berbagai wadah wartawan dengan ideologi dan orientasi yang berbeda-beda.

Dengan adanya pemberitaan kasus hukum yang mencuat paska meninggalnya mantan penguasa Bapak Soeharto maka selalu jadi sorotan dan berita hangat di beberapa media nasional baik cetak maupun elektronik. Media pun akan mengemas dan memberitakannya ke khalayak luas yang tak lepas dari opini serta pengaruh dari berbagai pihak hingga terjadi perbedaan sudut pandang antara media yang satu dengan media lainnya. Proses yang dilakukan media dalam mengkonstruksi suatu realitas sangat tergantung dari media itu sendiri. Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda.⁴ Semua ini akan mempengaruhi pandangan dan keterpihakan suatu media terhadap realita.

Dalam penelitian ini peneliti memilih Koran Tempo dan Media Indonesia, sebab kedua koran tersebut memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Masih dapat kita ingat tentang pembredelan Koran Tempo yang dinaungi oleh Grup Tempo pada 21 Juni 1994 pada masa kepemimpinan

⁴ Herbert J. Gans, "Multiperspectival News", dalam Elliot D. Cohen (ed), *Philosophical Issues in Journalism*, (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 191

Soeharto dimana dikarenakan “Tempo menurunkan laporan utama tentang pembelian kapal perang eks-Jerman Timur dengan kulit muka berjudul Habibie dan Kapal itu pada 11 Juni 1994”⁵, dimana Koran Tempo mendapatkan tekanan yang besar dari pemerintah dikarenakan oleh pemberitaan Koran Tempo tersebut yang sangat kritis pada pemerintahan Orde Baru yang sedang berkuasa, serta akibat dari “majalah mingguan Tempo dan *editor* menjadikan gambar dan nama Bung Karno sebagai *Cover* terbitannya tak kurang dari 20 kali”⁶. Dan akhirnya membuat sang jendral besar itu sangat marah, kini Soeharto sudah tidak berkuasa lagi seperti dulu. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pemberitaan kasus hukum Soeharto, seiring dengan hal itu mulai banyak perubahan di berbagai sektor termasuk sektor pemberitaan, media masa bebas memberitakan apapun yang terjadi tanpa ada lagi tekanan begitu pula dengan pemberitaan Koran Tempo pengemasan pemberitaan kasus hukum Soeharto ditanggapi dengan kritis dan tetap harus diproses sedangkan redaksional pemberitaannya lebih tegas dan sedikit pedas. Beberapa contoh petikan pemberitaan dalam Koran Tempo “Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan kasus perdata ini akan terus berlanjut meskipun Soeharto meninggal menurut dia, putra-putri Soeharto akan tetap mewarisi gugatan perdata itu”⁷, dengan *headline* yang sudah mendiskreditkan Soeharto atas kasus korupsinya seperti berikut “Washington

⁵ Majalah Pantau, edisi Agustus 2001, Diperoleh dari http://pantau-foundation.blogspot.com/2001_08_01_archive.html Browsing, 26 Februari 2008

⁶ Sudibyo, Agus, Politik media dan pertarungan wacana, Yogyakarta 2001, LKIS, Hal. 213, dari Karen Brook, “*The Rustle of Ghosts: Bung Karno In The New Order*”, dalam bahasa Indonesia, Vol. 60, 1994, hlm. 64

⁷ Koran Tempo edisi, 29 Januari 2008

Ungkap Dugaan Korupsi Soeharto”⁸, “Tim Kejaksaan Agung yang mewakili negara, menggugat Soeharto dan yayasan Supersemar berupa ganti rugi materil US\$ 425 juta dan Rp 185 miliar serta imateriil Rp 10 triliun”⁹ di sini juga ditekankan bahwa uang hasil dugaan korupsi Soeharto akan tetap diburu bahkan dengan imateriil untuk negara melalui tim Kejaksaan Agung.

Dari beberapa petikan pemberitaan pada Koran Tempo selama 3 hari diatas sangat terlihat bahwa kasus hukum Soeharto harus terus berlanjut dan diselesaikan secara hukum meskipun sang tergugat telah meninggal dunia tetapi dana yang selama ini dikorupsi harus tetap dikembalikan kepada negara dengan mengesampingkan dulu jasa-jasa yang pernah dilakukan mantan presiden kedua RI tersebut.

Sedangkan pada Media Indonesia yang notabene kepemilikannya adalah Surya Paloh yang dikenal sebagai putra Aceh sekaligus satu atap partai dengan Soeharto yakni “GOLKAR”, sehingga sosok Surya Paloh sendiri secara tidak langsung berpengaruh pada pemberitaan Media Indonesia, yang merupakan media cetak yang tergabung dalam Grup Metro bersama stasiun televisi Metro TV. Bila diamati tentang pemberitaan kasus hukum Soeharto dalam koran Media Indonesia pengemasan pada pemberitaanya lebih cenderung halus dan sopan bahkan juga lebih bersikap hati-hati terlihat pada pemberitaannya selama 3 hari. Beberapa contoh petikan pemberitaan dalam koran *Media Indonesia*, dilihat dari *headline* nya saja “Pemerintah gagal sikapi status hukum”, dilihat dari *headline* nya saja Media Indonesia dengan

⁸ Koran Tempo edisi, 30 Januari 2008

⁹ Koran Tempo edisi, 31 Januari 2008

jelas menyalahkan bahwa menggantungnya kasus hukum Soeharto ini karena kesalahan pemerintah. Tidak hanya itu, pengemasan kata-katanya lebih halus, contoh “menurut Lukman Saifudin ketua DPP PPP dalam pengusutan kasus Pak Harto tidak disertai dengan dendam. Prosesnyapun agar diselesaikan secara proporsional, adil, objektif dan bermartabat.”¹⁰, “Juan Felix Tampubolon mantan kuasa hukum Pak Harto mengatakan seharusnya hakim bersikap pasif dalam perkara perdata karena perkara perdata adalah perkara antara penggugat dan tergugat, seharusnya penggugat yang berinisiatif melanjutkan perkara atau tidak.”¹¹ Disini juga dapat dilihat bahwa pemberitaan yang dimuat atas kasus hukum Soeharto berdasar dari orang-orang terdekat Soeharto dan menyalahkan hakim atas keputusannya yang pro aktif, yang mewajibkan kuasa hukum untuk menentukan ahli waris pengganti kedudukan Pak Harto dalam persidangan serta mengajukan bukti-bukti untuk menentukan siapa ahli waris almarhum HM Soeharto.

Bahkan pada pemberitaan Media Indonesia selama beberapa hari di atas lebih banyak mengekspos tentang berita meninggalnya Soeharto, jasa-jasa beliau, serta banyak masyarakat yang kehilangan dan berduka dengan bentuk berita yang dibesar-besarkan. Sedangkan tentang kasus hukumnya hanya beberapa saja dan dipaparkan secara halus. Hal ini secara sengaja ditulis Media Indonesia untuk memberikan citra positif dimata publik tentang sosok Soeharto. Berkebalikan dengan Media Indonesia, Koran Tempo banyak mengupas tentang bagaimana dengan kelanjutan kasus hukum Soeharto paska

¹⁰ Media Indonesia edisi, 29 Januari 2008.

¹¹ Media Indonesia edisi, 30 Januari 2008.

meninggal daripada mengekspos tentang berita meninggalnya sang mantan penguasa Orde Baru tersebut. Disini sebenarnya terdapat perbedaan kepentingan dari wartawan maupun penguasa media meskipun tanpa ia sadari sepenuhnya. Wartawan menganggap beritanya objektif, berimbang dan dua sisi, padahal secara tidak langsung berita itu ternyata melanggengkan dan menguntungkan kekuatan ekonomi politik yang dominan.¹² Proses pemberitaan mempunyai implikasi yang sangat penting dalam bidang politik, pemberitaan media massa dapat menjadi senjata yang ampuh bagi elit politik dalam melakukan rekayasa opini publik. Kebenaran opini publik sangat rentan terhadap pengaruh *package* pemberitaan media, kebenaran ini dapat tereduksi oleh rekayasa *package* pemberitaan media pihak-pihak yang terlibat dalam wacana media.¹³ Surat kabar, sebagai salah satu media penyampai pesan kepada khalayak, memiliki peranan yang cukup berarti dalam membangun persepsi masyarakat yang bervariasi terhadap suatu realitas.

Dapat dimisalkan dalam pemberitaan kasus hukum Soeharto paska meninggal dunia, dalam menyampaikan pesan, media akan menggunakan *frame* mereka masing-masing. *Framing* suatu media erat kaitannya dengan opini masyarakat yang akan muncul, hal ini disebabkan karena setelah isu tertentu mengalami pengemasan dengan bingkai tertentu pula bisa mengakibatkan pemahaman khalayak yang berbeda atas sebuah realita. Dalam fenomena kasus hukum Soeharto ini masyarakat akan memiliki persepsi yang

¹² McNair Brian, *An Introduction to Political Communication*, London and New York, Routledge, (1995) hal 56-60 dalam Agus, Sudibyo, *Politik media dan pertarungan wacana*, Yogyakarta 2001, LKIS, Hal. 5

¹³ *Ibid*, hal. 225

berbeda-beda sesuai dengan media yang membangun serta menyampaikan informasi tersebut kepada mereka, sudut pandang permasalahan juga akan berbeda dikarenakan cara pandang masing-masing individu berbeda pula, yang akhirnya mendapatkan solusi dan jalan keluar yang berlainan bagi setiap individu.

Setiap media memang selalu berupaya untuk membentuk opini khalayaknya untuk bisa memaknai berita yang dikehendakinya. Perbedaan dari dua harian surat kabar Media Indonesia dan Koran Tempo atas pemberitaan kasus hukum Soeharto itulah yang mengundang perhatian peneliti untuk mengetahuinya lebih jauh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat peneliti yaitu bagaimana perbandingan konstruksi media massa khususnya Koran Tempo dan Media Indonesia dalam membingkai dan mengkonstruksi relitas mengenai berita kontroversi kasus hukum Soeharto?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Koran Tempo dan Media Indonesia dalam mengkonstruksi pemberitaan seputar kasus hukum mantan Presiden Soeharto pasca meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberitaan antara Koran Tempo dan Media Indonesia dalam membingkai berita seputar kasus hukum mantan Presiden Soeharto pasca meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat menjadi bahan bacaan dan kajian referensi bagi khalayak yang meminati studi analisis framing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para khalayak untuk lebih mengetahui bagaimana berita disajikan dan dapat memahami bagaimana cara media mengemasnya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang akan dipakai dalam memahami dan membahas lebih lanjut dan detail mengenai kecenderungan pemberitaan seputar kasus hukum Soeharto adalah sebagai berikut :

1. **Media Sebagai Konstruksi Realitas Sosial**

Media massa di Indonesia saat ini tampaknya tak hanya menambah jumlah media massa, tetapi juga mengubah gaya dan cara-cara pemberitaan. Persaingan yang sangat ketat diantara media massa menuntut agar institusi surat kabar menciptakan berbagai macam cara dalam pemberitaan demi merebut pangsa pasar pembaca.

“Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subyek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarakan pada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas.”¹⁴

Sebuah media dalam paradigma konstruksionis bukanlah sebagai sebuah saluran yang bebas, melainkan juga subyek yang mengkonstruksi realitas. Wartawan dalam mempertemukan sudut pandang yang berbeda-beda akan menggunakan sebuah media, dimana semua pihak akan berusaha menonjolkan penafsiran dan argumentasinya masing-masing. Dalam setiap peristiwa yang sama setiap media memiliki perbedaan dalam menyampaikannya kepada para khalayaknya, meskipun sebenarnya sebuah sikap yang obyektif adalah panutan dari setiap jurnalis yang profesional akan ada yang mengekspos aspek tertentu yang dianggapnya penting dan mengaburkan bahkan menutupi aspek lainnya, dan juga akan ada yang mengangkat aktor tertentu ada pula yang menghilangkan aktor lainnya.

Dua peran yang akan dimainkan media.¹⁵

- 1) Media sebagai sumber kekuatan hegemonik maksudnya adalah media memiliki kekuasaan berupa otoritas dan kemampuan memilah-milah narasumber yang sesuai dengan keberpihakan itu sendiri.
- 2) Media sebagai sumber legitimasi. Artinya melalui media, mereka yang berkuasa dapat memupuk kekuasaannya agar tampak absah, benar dan memang seharusnya begitu.

Media yang mempunyai keterpihakan sering menggunakan istilah “dimaafkan” dalam kasus hukum Soeharto, yang sering kali digunakan

¹⁴ *Ibid*, hal. 55

¹⁵ *Ibid*

sebagai upaya untuk mengaburkan kasus hukumnya di mata khalayak luas. Sebuah berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan suatu relitas dan menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri, melalui berbagai instrumen yang dimilikinya.

Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas itu dengan konstruksinya masing-masing.¹⁶ Kalau pun ada sebagian masyarakat yang ingin agar Soeharto dimaafkan mengingat jasa-jasanya pada bangsa ini, selalu diekspos secara besar-besaran. Hal itu bukan menunjukkan realitas yang sebenarnya karena memang tidak semua masyarakat mau memaafkannya, tetapi juga media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas yang ada. Media adalah agen yang secara aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.¹⁷ Berita yang kita baca setiap hari di media massa sebenarnya adalah produk pembentukan sebuah realitas oleh media massa.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan dipindah begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika tersebut.¹⁸

¹⁶ Eriyanto, 2002, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media)*, Yogyakarta: LKIS, hal. 15

¹⁷ *Ibid*, hal. 23

¹⁸ *Ibid*, hal. 17

Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang dikonstruksi (*constructed reality*) dalam bentuk wacana yang bermakna.¹⁹ Tetapi ada hal lain yang mempengaruhi konstruksi realitas yang dilakukan suatu media dalam mekanisme pemberitaannya selain sudut pandang wartawan. Terkadang media juga dipengaruhi oleh institusi lain seperti institusi ekonomi, politik maupun perkembangan teknologi. Dampak dari keseluruhan proses konstruksi realitas politik pertama-tama adalah munculnya opini publik mengenai kehidupan politik, bentuk opini itu adalah gambaran politik positif atau negatif mengenai suatu realitas politik selanjutnya bagi komunikasi politik, opini publik ini akan memberi pengaruh terhadap pembelajaran politik dan usaha mempengaruhi pejabat dalam pengambilan keputusan.²⁰ Dapat dilihat bahwa media juga dapat mempengaruhi institusi lain dengan berbagai pemberitaannya.

2. Paradigma Konstruksionis dalam Berita

Paradigma konstruksionis adalah sebuah paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Pendekatan seperti ini juga bisa disebut pendekatan konstruksivisme. Adapula paradigma yang melihat komunikasi sebagai sebuah pandangan efek media dalam mentransmisikan pesan. Paradigma seperti ini disebut sebagai paradigma positivisme. Pendekatan efek media dan konstruksionis tersebut merupakan dua paradigma besar dalam kajian ilmu komunikasi.

¹⁹ Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, hal. 11-12

²⁰ *Ibid*, hal. 28

Seperti yang dikatakan John Fiske dalam buku *Introduction to Communication Studies*.²¹

“Susunan buku ini merefleksikan fakta bahwa ada dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi. Pertama, melihat komunikasi sebagai proses pengiriman pesan. ini berhubungan dengan bagaimana pengirim dan penerima mengirim dan menerima pesan. Paradigma yang kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan proses pertukaran makna. Ini berhubungan dengan bagaimana pesan-pesan atau teks berinteraksi dengan khalayak dalam produksi makna, untuk itu titik perhatiannya dengan aturan teks itu dalam budaya kita”

Hal yang telah diungkapkan John Fiske tersebut menjelaskan tentang adanya perbedaan pandangan yang melahirkan dua paradigma besar dalam ilmu komunikasi. Yang pertama paradigma yang melihat komunikasi sebagai proses pengiriman atau transmisi pesan. Paradigma ini disebut paradigma *positivistik* yang menitikberatkan pada proses berlangsungnya pesan melalui transmitter dari pengirim (komunikator) ke penerima (komunikan). Kedua yaitu paradigma yang melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna yang disebut dengan paradigma *konstruksionisme*. Seperti dalam pemberitaan kasus hukum Soeharto yang dimuat sebuah media, pemberitaannya ada yang cenderung dibesar-besarkan ada pula yang cenderung disamarkan dari sebuah realita yang sebenarnya menggunakan bahasa-bahasa tertentu untuk mengkonstruksinya. Dengan demikian bahasa merupakan nyawa

²¹ Fiske, John, 1990, *Introduction to Communication Studies*, Second Edition, London and New York, hal. 2

kehidupan media massa. Hanya melalui bahasa para pekerja media bisa menghadirkan hasil reportasenya kepada khalayak.²²

Menurut Giles dan Wiemann bahasa atau (teks) mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri dengan konteks. Dengan begitu, lewat bahasa yang dipakainya (melalui pilihan kata dan cara penyajian) seseorang bisa mempengaruhi orang lain (menunjukkan kekuasaannya). Melalui teks yang dibuatnya, ia dapat memanipulasi konteks.²³

Melalui interpretasi wartawan, sebuah peristiwa, isu ataupun fenomena dapat menjadi sebuah berita yang menarik. Wartawan dapat membentuk dan menentukan apakah suatu peristiwa atau realitas dapat dijadikan berita. Secara garis besar pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian tersendiri dalam menilai bagaimana fakta, media, berita dan wartawan. Kita dapat melihat adanya perbedaan penilaian tersebut dalam tabel 1.1. di bawah ini :²⁴

²² *Opcit*, 2004, hal. 15

²³ *Ibid*, hal. 14

²⁴ Guba & Lincoln, dalam Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, hal. 78

Tabel 1.1
Perbedaan Paradigma Positivis dan Konstruksionis

	Paradigma Positivis	Paradigma Konstruksionis
Perbedaan Ontologis	Ada fakta yang riil yang diatur kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal.	Fakta merupakan konstruksi atas realitas.
	Berita merupakan cermin dan refleksi dari kenyataan.	Berita tidak mungkin dari realitas karena berita yang terbentuk merupakan hasil pemahaman dan pemaknaan wartawan.
Perbedaan Epistemologi	Ada suatu realitas objektif, diluar diri wartawan. Wartawan meliput realitas yang tersedia dan objektif.	Realitas bersifat subjektif. Realitas merupakan hasil pemahaman dan pemaknaan wartawan.
	Wartawan membuat jarak dengan objek yang hendak diliput, sehingga yang tampil bisa objektif.	Wartawan tidak mungkin membuat jarak dengan realitas. Realitas merupakan produk transaksionis antara wartawan dengan objek yang hendak diliput.
	Realitas sebagai hasil liputan wartawan harus bersifat objektif, dalam arti memberitakan apa yang terjadi apa adanya.	Realitas sebagai hasil liputan wartawan bersifat subjektif. Realitas yang terbentuk merupakan olahan dari pandangan atau perspektif dan pemaknaan wartawan ketika meliput suatu peristiwa.
Perbedaan Aksiologi	Nilai, etika, opini dan pemilihan moral berada diluar proses peliputan berita.	Nilai, etika, dan keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
	Wartawan berperan sebagai pelopor.	Wartawan berperan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.
	Tujuan peliputan dan penulisan berita: eksplanasi dan menjelaskan apa adanya.	Tujuan peliputan dan penulisan berita: rekonstruksi peristiwa secara dialektis antara wartawan dengan peristiwa yang diliput.
Perbedaan Metodologis	Kualitas pemberitaan: liputan dua sisi. Objektif dan kredibel	Kualitas pemberitaan: interaksi antara wartawan dan objek yang diliputnya, intensitas
	Menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan dan memakai bahasa <i>Straight</i> , tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka.	Opini subjektifitas tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif dan bahasa selalu menimbulkan penafsiran yang beraneka.ss

Tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan cara pandang antara pendekatan paradigma konstruksionis dan positivistik terhadap sebuah realitas. Paradigma konstruksionis melihat fakta maupun

berita merupakan realitas yang dihadirkan dalam konsep wartawan yang merupakan sebuah hasil pemahaman dan pemaknaan terhadap sebuah objek yang diliput karena wartawan yang meliput berita tidak dapat menghilangkan nilai, etika, opini, pilihan moral dan keterpihakannya dalam proses pembuatan berita. Sebaliknya paradigma positivistik memandang sebuah berita atau realitas yang muncul dari sebuah liputan wartawan merupakan yang sesungguhnya dan apa adanya. Pemberitaan dalam positivistik haruslah diliput sesuai atau sama dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Disini wartawan harus menghilangkan pandangan subyektif dan opini dari wartawan itu sendiri agar menjadi sebuah pemahaman yang sama dan tidak berbeda-beda.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berita

Kita ketahui bahwa proses produksi berita bukan merupakan ruang netral yang hanya digunakan sebagai penyampai pesan atau informasi, tetapi proses pembentukan berita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese dalam bukunya *Mediating the Message : Theories of Influence on Mass Media Content*, mengidentifikasi ada lima faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Kelima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁵

a. Faktor Individual

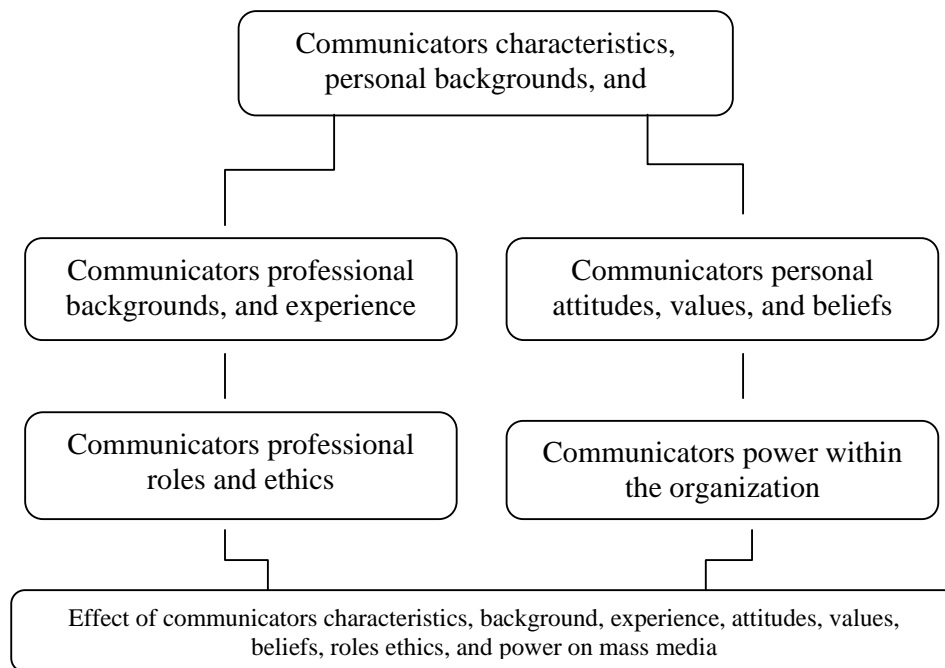
Faktor ini menitikberatkan pada individu jurnalis dan pengelola media yang berhubungan dengan latar belakang profesionalisme

²⁵ Sudibyo, Agus, *Opcit*, hal. 7

pengelola media serta latar belakang kehidupan wartawan seperti jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, orientasi keagamaan, dan budaya akan mempengaruhi pola pemberitaan.²⁶ Setiap orang mempunyai karakteristik, pengalaman serta latar belakang yang berbeda-beda begitu pula dengan pekerja media. Perbedaan ini tentunya akan dapat mempengaruhi cara mereka dalam proses pemberitaan. Terutama seorang jurnalis, teks berita yang mereka buat akan sesuai dengan sudut pandang serta dapat mencerminkan karakter dan latar belakang yang mereka miliki. Bagaimana faktor-faktor individual tersebut dapat ditunjukkan dalam skema berikut :²⁷

Gambar 1.1

Faktor Internal yang Mempengaruhi Isi Media



²⁶ Shoemaker dan Reese, *Mediating the Message : Theories of Influence on Mass Media Content*, Hal. 102

²⁷ *Ibid*, hal. 65

Skema tersebut menjelaskan karakter, latar belakang, pribadi dan pengalaman dari komunikator tidak hanya membentuk sikap, nilai dan kepercayaan individu komunikator tetapi juga menunjukkan latar belakang profesional dan pengalaman. Pengalaman dan profesional kemudian membentuk aturan dan etika profesional komunikator. Aturan dan etika komunikator dapat secara langsung mempengaruhi isi media massa. Sedangkan dari sikap, nilai dan kepercayaan tidak dapat berpengaruh secara langsung karena diimbangi dengan sikap profesional serta pengalaman mereka.

b. Rutinitas Media

Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita, rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk melalui proses dan tangan siapa saja sebelum sampai ke proses cetak.²⁸ Sebelum sebuah berita diturunkan oleh media tentunya akan ada proses seleksi terlebih dahulu. Proses seleksi tersebut terjadi dalam suatu rutinitas kerja redaksi atau media dalam pembentukan berita. Ada prosedur standar yang harus dilalui oleh pengelola media. Prosedur standar tersebut bersifat relatif karena setiap media memiliki standar sendiri-sendiri dalam memproduksi berita. Secara umum prosedur standar dapat dirangkum sebagai berikut :²⁹

²⁸ Sudibyo, Agus, *Opcit*, hal. 8

²⁹ Shoemaker dan Reese, *opcit*, hal. 111

- 1) *Prominance*, yaitu penting tidaknya berita dilihat dari sedikit banyaknya efek yang ditimbulkannya.
- 2) *Human interest*, yaitu peristiwa yang memberikan sentuhan perasaan pembaca. Hal ini dapat berupa peristiwa orang biasa dalam situasi luar biasa atau peristiwa orang populer dalam peristiwa biasa.
- 3) *Conflict controversy*, yaitu informasi yang menggambarkan pertentangan antar individu, kelompok, negara ataupun blok negara.
- 4) *Unique*, yaitu informasi mengenai peristiwa yang unik dan jarang terjadi.
- 5) *Timeliness*, yaitu informasi penting yang menyangkut hal-hal yang sedang terjadi.
- 6) *Proximity*, yaitu informasi kejadian yang dekat dengan pembaca baik secara geografis maupun emosional.

c. Level Organisasi

Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang mempengaruhi pemberitaan didalam organisasi media, selain bagian redaksi juga ada bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian umum dan yang lainnya.³⁰ Kesemua bagian tersebut dapat mempengaruhi pemberitaan dengan kepentingan-kepentingan yang belum tentu sejalan satu dengan lainnya. Setiap individu dapat mempunyai tujuan yang beragam dan cara sendiri untuk mewujudkannya. Pemilik modal, pengiklan dan pemasaran juga dapat berpengaruh dengan pertimbangan besarnya kenaikan angka penjualan atau oplah media yang dihasilkan dari hasil pemberitaan tersebut.

³⁰ Sudibyo, Agus, *Opcit*, hal. 9

d. Level Ekstramedia

Pada kenyataannya proses pemberitaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor di dalam media tetapi pemberitaan media juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari luar organisasi media. Ada tiga faktor di luar lingkungan media yang dapat mempengaruhi pemberitaan yaitu :³¹

1) Sumber berita

Sumber berita disini dipandang bukanlah sebagai pihak yang netral yang memberikan informasi apa adanya, ia juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan : memenangkan opini publik, atau memberi citra tertentu pada khalayak, dan seterusnya, sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, sumber berita tentu saja memberlakukan politik pemberitaan.³²

Sumber berita merupakan faktor dari luar yang pastinya akan memberikan opini atau pendapat sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya. Sumber tersebut juga tentunya akan berusaha agar orang lain mendukung argumen yang ia keluarkan bahkan dia bisa juga mengeluarkan argumen yang dapat menjatuhkan lawannya, hal ini dapat kita lihat pada saat para politisi berlomba-lomba mendapatkan suara. Dengan memberikan ruang pada

³¹ *Ibid*, hal. 10

³² *Ibid*

sumber berita dan memberitakannya sesuai dengan argumen yang mereka keluarkan, secara tidak sadar media terkadang menjadi corong informasi dari sumber berita tersebut.

2) Sumber penghasilan media

Media membutuhkan dana atau penghasilan untuk kelangsungan hidup media tersebut. Sumber penghasilan media tersebut dapat berasal dari pengiklan dan konsumen media. Hal ini berarti media harus banyak menyesuaikan pemberitaan yang akan disajikan ke khalayak dengan pengiklan maupun konsumen media. Terkadang pengiklan juga akan melakukan berbagai cara agar apa yang diberitakan media dapat sesuai dengan kepentingannya, salah satunya dengan menghilangkan pemberitaan atau isu yang dapat menjatuhkan maupun memperburuk citra dari pengiklan.

Media juga akan berusaha untuk menyajikan pemberitaan yang dapat, menarik para pelanggan untuk terus membeli media. Hal ini dapat mengurangi subjektivitas media dalam proses pembentukan berita. Tetapi jika media tidak mau menyesuaikan hasil pemberitaannya dengan pengiklan atau pembeli, media juga harus menerima konsekuensinya dengan kehilangan sumber penghasilan yang secara otomatis dapat mempengaruhi kelangsungan hidup media tersebut.

3) Pihak eksternal media, seperti pemerintah dan lingkungan bisnis

Media pastilah hidup dalam sistem pemerintahan dan tentunya tidak bisa luput dari lingkungan bisnis yang mengelilinginya. Untuk itu pemberitaan media haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pengaruh ini sangat ditentukan oleh corak dari masing-masing lingkungan eksternal media, di negara yang otoriter misalnya, pengaruh pemerintahan menjadi faktor dominan dalam menentukan berita apa yang akan disajikan, ini terjadi karena dalam negara yang otoriter, negara menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diberitakan, pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi penerbitan.³³ Keadaan yang digambarkan di negara otoriter diatas, tentunya berbeda dengan keadaan di negara demokratis, dimana tidak ada campur tangan dari pemerintah. Pengaruh dari lingkungan pasar dan bisnis akan mempunyai pengaruh yang lebih besar.

e. Level Ideologi

Ideologi dalam pengertian yang paling umum adalah pikiran yang terorganisir, yakni nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan

³³ *Ibid*, hal 12

komunikasi antar pribadi.³⁴ Dan masih ada beberapa definisi lain tentang ideologi. Menemukan tiga penggunaan utama³⁵ :

- 1) Suatu sistim keyakinan yang menandai kelompok sosial atau kelas tertentu.
- 2) Suatu sistim keyakinan ilusioner --- gagasan palsu atau kesadaran palsu --- yang bisa dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau pengetahuan ilmiah.
- 3) Proses umum produksi makna atau gagasan.

Dari ketiga penggunaan utama dari ideologi di atas dapat diuraikan sebagai berikut :³⁶

Penggunaan pertama. Penggunaan ini lebih cenderung dekat dengan penggunaan di kalangan psikologi. Para psikolog menggunakan ideologi dengan diacukan pada cara sikap diorganisasikan kedalam pola-pola yang koheren. Contoh seseorang yang menganut sikap tertentu tentang anak muda, dia yakin bahwa menjalani tugas beberapa tahun dalam wajib militer akan memberi anak muda itu kekuatan dan memecahkan hampir semua masalah sosial kita, kita dengan yakin mungkin meramalkan sikap orang tadi akan ditujukan pada subyek-subyek seperti kejahatan dan hukuman, kelas, ras, dan agama. Bila perkiraan kita tepat kita dapat menyatakan bahwa orang itu berideologi sayap kanan dan otoriter, namun seperti ditegaskan beberapa psikolog bahwa ideologi itu ditentukan masyarakat, bukan serangkaian sikap dan pengalaman individu yang mungkin saja khas.

³⁴ Sobur, Alex, Drs, M.Si. Analisis Teks Media, Remaja Rosdakarya. Bandung (2001). Hal. 64

³⁵ Raymond Williams (1977) dalam John Fiske, *Cultural and Communication Studies*, hal.228

³⁶ *Ibid*, hal. 229

Penggunaan kedua. Penggunaan ini seperti yang ditulis Williams menunjukkan bahwa dalam prakteknya penggunaan 1 dan 2 tak pelak lagi akan saling berbaur, karena itu ideologi menjadi kategori-kategori ilusi dan kesadaran palsu yang berdasarkan hal tersebut kelas yang berkuasa menjaga dominasinya terhadap kelas pekerja, karena kelas yang berkuasa mengontrol sarana-sarana pokok tempat ideologi digandakan dan disebarluaskan pada seluruh masyarakat maka ideologi bisa membuat kelas pekerja melihat subordinasinya itu sebagai hal yang alami dan karena alami maka benar. Disinilah letak kekeliruannya media ideologis tersebut mencakup sistem-sistem pendidikan, politik, dan hukum serta media massa dan penerbitan buku. Contoh pembacaan kita atas sebuah foto menjelaskan bagaimana pemaknaan atas foto itu bergantung pada ideologi dominan yang didalam foto tersebut menempatkan pembacanya.

Penggunaan ketiga. Inilah yang menjadi dominasi dari ketiganya bahkan tiga penggunaannya mungkin hampir bisa dimodelkan sebagai kotak Cina, 1 ada di dalam 2 yang keduanya ada di dalam 3. Ideologi disini merupakan istilah yang digunakan untuk melukiskan produksi sosial atas sebuah makna. Barthes menggunakan istilah ini tatkala dia berbicara tentang pengkonotasian (*connotator*), yakni penanda konotasi, sebagai retorika ideologi dalam penggunaannya yang seperti ini, ideologi merupakan sumber pemaknaan tatanan kedua. Mitos dan

nilai-nilai konotatif adalah ideologi karena ideologi itulah maka mitos dan konotasi mewujudkan kegunaannya.

Media membentuk berita dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu. Pesan yang berupa berita yang disampaikan media kepada khalayak tak lepas dari ideologi yang dimiliki media, mereka mempunyai kewenangan penuh dalam membuat isi berita, hal ini disesuaikan dengan ideologi yang mereka miliki. Ideologi media menyangkut nilai-nilai yang dianut media tersebut.

Tetapi bila kita amati lebih dalam lagi, ideologi media yang ada dalam setiap informasi yang kita terima dari media massa juga mengandung suatu muatan politik bahkan serta ekonomi. Kekuasaan menjadi sesuatu yang diagungkan dan diinginkan banyak orang, sehingga untuk mendapatkannya mereka mampu melakukan segala cara bahkan cara yang tidak wajar, salah satunya yaitu kelompok penguasa mencoba meracuni kerangka berfikir individu untuk mensahkan kekuasaan. Kekuatan ideologi sebuah media terletak pada kemampuannya untuk melibatkan kelompok subordinat dalam mengkonstruksikan identitas sosial atau subjektifitas mereka untuk melawan kepentingan sosial politik penguasa.³⁷

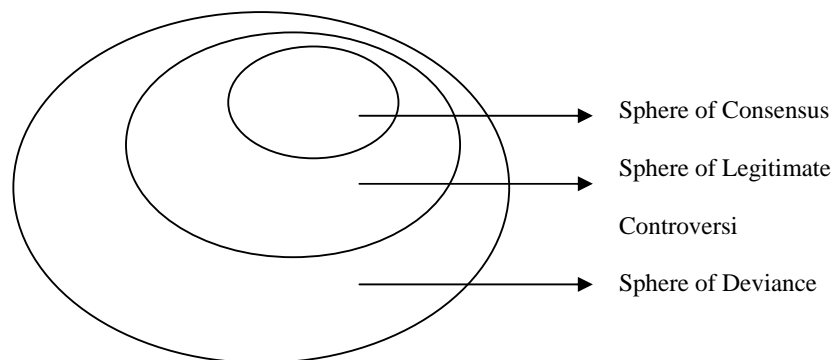
Ideologi media dapat dilihat dalam teks media seperti: dengan melihat penandaan realitas yang dilakukan media, dari sisi mana media

³⁷ Althusser dalam John Fiske, *Introduction to Communication Studies*, Second Edition, London and New York. 1990, hal. 228

menempatkan dirinya serta penilaian apa yang mereka berikan. Dalam bidang penyimpangan, konsensus (berarti media setuju dengan realitas yang telah ada) atau kontroversi (media tidak setuju atau kontra terhadap realitas yang ada). Daniel Hallin membuat ilustrasi dan gambaran menarik yang menolong menjelaskan bagaimana berita kita tempatkan dalam bidang /peta ideologi.³⁸

Daniel Hallin membagi dunia jurnalistik kedalam tiga bidang. *Pertama*, bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), *kedua*, bidang kontroversi (*sphere of legitimate controversy*) dan *ketiga*, adalah bidang konsensus (*sphere of consensus*). Ketiga bidang diilustrasikan dalam skema di bawah ini:³⁹

Gambar 1.2
Peta Ideologi Media



Ketiga bidang ideologi tersebut dapat menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam

³⁸ Shoemaker dan Reese, *opcit*, hal. 227

³⁹ Eriyanto, *OpCit*, hal. 127

keseluruhan peta ideologi pembaca. Dalam wilayah penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan atau perilaku tertentu dikucilkan dan dipandang menyimpang. Ini semacam nilai yang dipahami bersama bagaimana suatu peristiwa secara umum dipahami secara sama antara berbagai anggota komunitas. Bidang kedua adalah wilayah kontroversi. Kalau pada bidang yang paling luar ada kesepakatan umum bahwa realitas (peristiwa, perilaku, gagasan) dipandang menyimpang dan buruk, dalam area ini realitas masih diperdebatkan/dipandang kontroversial. Sedangkan wilayah yang paling dalam adalah konsensus: menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

Ada banyak cara yang dilakukan media dalam mengkomunikasikan suatu penyimpangan. Tujuan utamanya adalah memberi legitimasi pada perilaku atau gagasan tertentu dan mendelegitimasi gagasan atau perilaku lain yang dipandang menyimpang.

Dengan adanya perbedaan sudut pandang antara intitusi negara dengan sebuah media pemberitaan tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi perpolitikan dan keadaan ekonomi yang ada. Seperti yang dicatat oleh Anggela Romano di bawah ini:

Mengekspos korupsi, kolusi dan mismanajemen kerap dianggap salah karena secara sosial itu mengganggu dan

merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara yang masih lemah dan baru tumbuh.⁴⁰

Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompetensi tertentu, ideologi disini tidaklah harus dikaitkan dengan ide-ide besar, ideologi juga bisa bermakna politik dari bagaimana kita melihat peristiwa dengan kaca mata dan pandangan tertentu dalam arti luas adalah sebuah ideologi. Titik atau posisi melihat itu menggambarkan bagaimana peristiwa dijelaskan dalam kerangka berfikir tertentu.

Louis Althusser seorang filsuf Perancis yang lahir di Bimandries, Aljazair dan meninggal di Paris pada tahun 1990⁴¹, semasa hidupnya ia dikenal sebagai seorang teorisi dan kritikus Marxis lebih tepatnya adalah seorang Marxis dengan kecenderungan strukturalis. Althusser pernah mengajukan konsep *State Apparatus* (SA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA), keduanya merupakan konsep yang penting yang berguna dalam kajian budaya, *State Apparatus* bisa terdiri dari polisi, pengadilan, penjara yang keberadaannya berhubungan dengan praktik legal⁴². Sedangkan *Ideological State Apparatus* terdiri dari beberapa institusi yang terpesialisasi ISA agama, ISA pendidikan, ISA keluarga, ISA hukum, ISA politik, ISA serikat buruh, ISA komunikasi, ISA budaya⁴³. *State Apparatus* (SA) lebih memusatkan pengaruhnya pada wilayah

⁴⁰ Steele, Janet, *Within*, 2007, hal. 81

⁴¹ Louis Althusser, *Tentang Ideologi*, hal. viii

⁴² *Ibid*, hal. 14

⁴³ *Ibid*, hal. 20

publik, sementara *Ideologi State Apparatus* (ISA) lebih memusatkan pengaruhnya pada wilayah yang bersifat privat. Perbedaan dasarnya adalah *State Apparatus* yang represif berfungsi melalui kekerasan sementara *Ideologi State Apparatus* berfungsi melalui ideologi.⁴⁴ Tetapi sebenarnya tidak ada (SA) yang berfungsi hanya dengan kekerasan saja, atau (ISA) yang berfungsi dengan Ideologi saja, keduanya kadang-kadang mencampurkan kedua pendekatan itu represif dan ideologis dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Althusser mempunyai dua tesis tentang ideologi, tesis pertama mengatakan bahwa ideologi itu adalah representasi dari hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensi nyatanya⁴⁵. Yang direpresentasikan di sini bukan relasi riil yang memandu eksistensi individual, tetapi relasi imajiner antara individu dengan suatu keadaan dimana mereka hidup didalamnya. Tesis kedua mengatakan bahwa representasi gagasan yang membentuk ideologi itu tak hanya mempunyai eksistensi spiritual, tapi juga eksistensi material⁴⁶. Jadi bisa dikatakan bahwa aparatus ideologi negara adalah realisasi dari ideologi tertentu, ideologi selalu eksis dalam bentuk aparatus.

Eksistensi tersebut bersifat material, material tersebut menurut Althusser ini bisa dikatakan sebagai kepercayaan seseorang atau ideologi seseorang terhadap hal tertentu akan diturunkan dalam bentuk-bentuk material yang secara natural akan diikuti oleh orang

⁴⁴ *Ibid*, hal. 21

⁴⁵ *Ibid*, hal. 39

⁴⁶ *Ibid*, hal. 42

tersebut. Misalnya jika kita percaya kepada Tuhan dan penganut agama tertentu maka kita akan pergi ke gereja untuk mengikuti misa, pergi ke masjid untuk sembahyang lima waktu. Atau kalau kita percaya keadilan maka kita akan tunduk pada peraturan hukum, menyatakan protes atau bahkan ikut ambil bagian dalam demonstrasi jika ketidakadilan menimpa kita.

Dari penjelasan di atas bisa ditarik benang merahnya yaitu ideologi media akan membangun konstruksi pemberitaan media yang akan membentuk opini khalayak terhadap pemberitaan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kontroversi kasus hukum Soeharto yang berkembang saat ini telah dikonstruksi oleh berbagai media, salah satunya adalah media cetak atau surat kabar. Dari latar belakang, kerangka teori, objek penelitian teknik pengumpulan data serta teknik yang digunakan untuk menganalisis data maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyajikan laporan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. "Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapat dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lain"⁴⁷ Data dalam pemberitaan ini adalah pemberitaan pada koran Tempo dan Media Indonesia tentang kontroversi kasus hukum Soeharto. Penelitian deskriptif juga dapat diuraikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

⁴⁷ Strauss dan Corbin, *Basic of Qualitative Research.*, Terjemahan Shodiq dan Imam Muttaqien (2003). Hal. 4

menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian suatu lembaga, masyarakat, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analisis *framing* yang mendefinisikan framing sebagai pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang akan di pakai oleh wartawan ketika menyeleksi isu, mengkonstruksi peristiwa, dan menyajikan kepada khalayak pembaca.

2. Objek Penelitian

Disini peneliti akan menggunakan dua surat kabar harian sebagai objek dari penelitian yaitu *Koran Tempo* dan *Media Indonesia*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media konvensional dan mengambil berita dalam rentang waktu tiga hari yaitu mulai dari tanggal 29 Februari hingga tanggal 31 Februari 2008 sebagai bahan penelitian. Peneliti memilih tanggal 29 sampai 31 Februari karena pada tanggal tersebut berita mengenai kasus hukum Soeharto mulai mencuat dan menjadi pembicaraan di berbagai media setelah meninggalnya beliau. Selain hal tersebut, juga terdapat perbedaan dalam pengemasan berita mengenai kasus hukum Soeharto di kedua media yang dipilih peneliti yaitu *Koran Tempo* dan *Media Indonesia*. Porsi yang dikeluarkan *Koran Tempo* mengenai kasus hukum Soeharto lebih besar daripada porsi yang dikeluarkan *Media Indonesia*. *Koran Tempo* mengeluarkan 6 berita sedangkan *Media Indonesia* hanya 3 berita saja. Hal tersebut justru menjadi sebuah daya

tarik yang memperlihatkan adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan dan keterkaitan dari kedua media tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Dalam penelitian analisis ini, pengumpulan data dilakukan dengan : Mengumpulkan Surat Kabar Harian *Media Indonesia* dan *Koran Tempo* edisi 29-31 Februari 2008, yang mengangkat berita tentang kasus hukum Soeharto.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui penelitian studi pustaka terhadap bahan-bahan yang berhubungan dengan analisis *framing*. Serta pengumpulan bahan-bahan yang didapat dari referensi lain, seperti internet, jurnal atau dokumentasi lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing*. Analisis *framing* sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar, dan perangkat lainnya. Framing secara sederhana dapat

digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media.⁴⁸

Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi dengan bentuk tertentu, hasilnya pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-orang tertentu.

Pembangunan konstruksi realitas pada masing-masing media akan berbeda-beda, meskipun realitas faktanya sama. Pengonstruksian fakta tergantung pada kebijakan redaksional yang dilandasi politik media. Salah satu cara yang dipakai atau yang digunakan untuk menangkap cara masing-masing media membangun sebuah realitas adalah dengan *framing*.

Analisis *framing* adalah salah satu studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada khalayak. Konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. “Gagasan *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955”⁴⁹ dan dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standart untuk mengapresiasi realitas.

Todd Gitlin mengatakan bahwa *frame* adalah sebuah cara atau strategi pembentukan realitas atas dunia dengan penyederhanaan sedemikian rupa melalui proses seleksi, pengulangan, penekanan dan persentase aspek tertentu untuk ditampilkan pada khalayak pembaca.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 3

⁴⁹ Sudibyo (1999) dalam Sobur, Analisis Teks Media, hal. 161

Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Tood gitlin melihat *frame* sebagai alat media untuk mengontrol dan mengendalikan cara berfikir khalayak.⁵⁰

Framing memiliki 4 model diantaranya adalah model Murray Edelman, Robert Entman, William A. Gamson dan Mondigliani serta model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, yang mempunyai salah satu perbedaannya ialah adanya elemen retorik yang dirinci secara detail dalam model Gamson serta Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki sedangkan tidak pada model Edelman maupun Entman. "Dalam elemen retorik berita bukan hanya berisi tentang pemilihan fakta, melainkan juga penekanan fakta. Penekanan itu dilakukan diantaranya dengan pemilihan kata, kalimat gambar atau grafik tertentu."⁵¹

Dalam penelitian ini akan digunakan *framing* model Willian A. Gamson, gagasan Gamson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi lain. Willian A. Gamson berpendapat bahwa "*framing* adalah cara bercerita (*story line*) atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana"⁵². Alur cerita tersebut terbentuk dalam sebuah kemasan yang oleh Gamson disebut *package*. *Package* dapat digambarkan sebagai suatu skema atau struktur pemahaman individu yang dibuat untuk

⁵⁰ Eriyanto (2002) *Opcit*, hal. 168

⁵¹ *Ibid*, hal. 288

⁵² *Ibid*, hal. 67

mengkonstruksi makna pesan atas peristiwa-peristiwa yang dapat disampaikan kepada khalayak dan sekaligus digunakan untuk menafsirkan pesan yang diterima.

Melalui metode dari William A. Gamson dan Andre Modigliani peneliti dapat melihat bagaimana *Koran Tempo* dan *Media Indonesia* dalam mengkonstruksi pemberitaan kasus hukum Soeharto dan menyajikannya kepada khalayak. Metode ini dianggap tepat sebagai metode yang dapat membedah rumusan masalah dari penelitian ini. Selain karena elemen-elemen yang terbilang tepat, juga dianggap lebih lengkap dari beberapa metode lain.

Gagasan Gamson mengenai framing media ditulis bersama Andre Modigliani. Gamson sebagai ilmuwan yang paling konsisten dalam mengembangkan konsep framing mendefinisikan frame sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita yang mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik (*pacage*) framing *analysis* yang dikembangkan Gamson dan Modigliani ini memahami wacana media sebagai suatu gugusan perspektif interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksi dan memberikan makna pada suatu isu atau peristiwa.⁵³

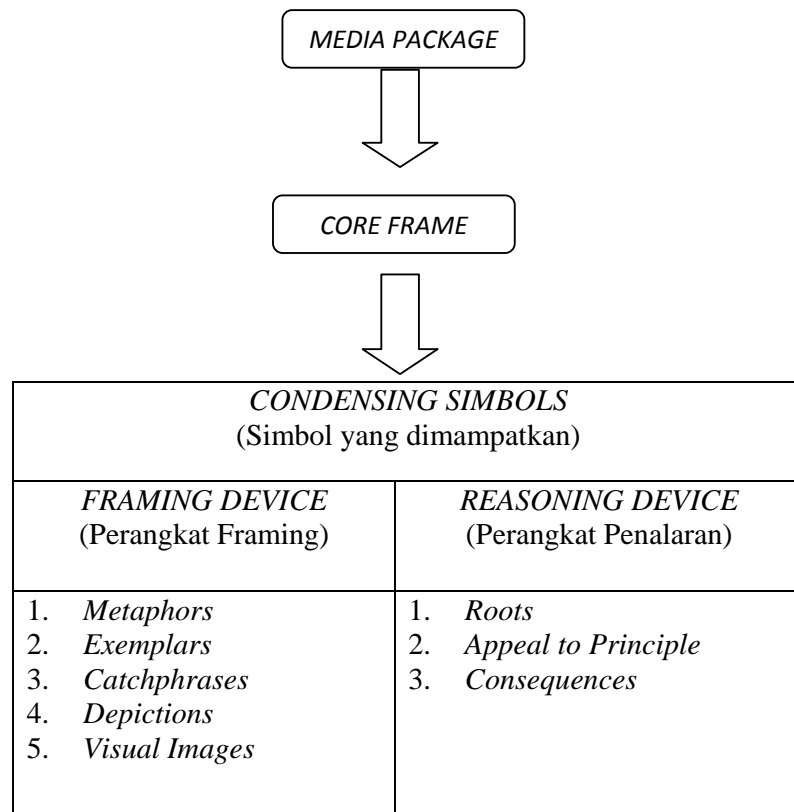
Package atau kemasan dalam pandangan Gamson merupakan rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang sedang dibicarakan serta peristiwa mana yang relevan. Kemasan tersebut dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat, wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang dapat menunjukkan posisi atau kecenderungan politik. Selain itu *package* juga dapat membantu komunikator untuk menjelaskan muatan atau makna-makna yang ada dibalik suatu isu atau

⁵³ Sobur, *Opcit*, Hal. 177

peristiwa. Keberadaan dari suatu *pacakge* terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana lain. Missalnya dari pemakaian kalimat, kata, metavra, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi dan sebagainya. “semua elemen dan struktur wacana tersebut saling mendukung dan mengisi yang selanjutnya akan mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita”⁵⁴

Perangkat *framing* yang dikemukakan oleh Gamson dan Modigliani dapat digambarkan secara lebih jelas sebagai berikut :

Gambar 1.3
Analisis Framing Model William A. Gamson dan Andre Modigliani



Sumber; William A. Gamson dan Andre Modigliani dalam Alex Sobur, 2001 : 177

⁵⁴ Eriyanto, *Opcit*, hal. 224-225

Dari media di atas bisa kita lihat bahwa *package* yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan terdapat dua struktur internal yaitu *core frame* dan *condensing symbol*. *Core frame* (gagasan sentral) pada dasarnya berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap sebuah peristiwa, dan mengarahkan makna sebuah isu yang dibangun *condensing symbol* (simbol yang dimampatkan). Sedangkan pada *condensing symbol* adalah sebuah hasil dari pencermatan terhadap intreraksi perangkat simbolik (*framing device* dan *reason device*) atau perangkat pembingkai dan perangkat penalaran.

Pada struktur *framing device* yang mencakup *metaphors*, *exemplar*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images* yang menekankan pada aspek bagaimana dalam melihat suatu isu peristiwa bagian dari *framing device* ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Metaphors* adalah sebuah cara memindahkan makna dengan merealisasikan dua fakta melalui analogi atau penggunaan kalimat perumpamaan dan pengandaian biasanya digunakan kalimat-kalimat seperti; ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana. Henry Guntur Tarigan menjelaskan *metaphors* sebagai berikut:

Metafora sebagai jenis gaya bahasa perbandingan yang paling singkat, padat, dan tersusun rapi. Didalamnya terlihat dua gagasan; yang satu adalah suatu kenyataan, sesuatu yang dipikirkan, yang menjadi objek; dan yang satu lagi merupakan perbandingan terhadap kenyataan tadi; dan kita menggantikan yang belakangan itu menjadi terdahulu tadi.⁵⁵

⁵⁵ Tarigan (1990) dalam Sobur, *Opcit*, hal. 179

Kutipan di atas menunjukkan bahwa metaphors bisa juga diartikan sebagai kenyataan yang ada dan diumpamakan dengan kata-kata kiasan yang mempunyai arti sama.

- b. *Exemplars* adalah mengemas fakta tertentu secara mendalam agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan atau pelajaran. Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk membenarkan perspektif.”⁵⁶ *Exemplar* menghubungkan *framing* dengan beberapa contoh atau uraian yang dapat berupa teori maupun perbandingan yang berguna untuk mendukung dan memperjelas frame. Hal tersebut digunakan untuk melengkapi *frame*.
- c. *Catchphrases* adalah rangkaian kata yang dapat mencerminkan fakta yang dapat menunjukkan sebuah pemikiran atau semangat tertentu dan biasanya berbentuk semboyan, selogan, atau jargon.⁵⁷
- d. *Depictions* adalah penggambaran fakta menggunakan kata-kata, istilah, kalimat konotatif agar pembaca diarahkan pada sebuah bentuk citra tertentu dapat berbentuk akronim, stigmatisasi, eufinisme. “Asumsinya pemakaian kata khusus diniatkan untuk membangkitkan prasangka, menyesatkan pikiran dan tindakan serta efektif sebagai bentuk aksi politik.”⁵⁸
- e. *Visual Images* adalah penggunaan diagram, foto, grafis, tabel, kartun untuk membuat sebuah kesan tertentu untuk mendukung bingkai

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Eriyanto, *Opcit*, hal. 225

⁵⁸ Sobur, *Opcit*, hal. 180

secara keseluruhan. Dapat dimisalkan pula dalam perhatian atau penolakan, dibesar-dikecilkan, ditebalkan atau dimiringkan serta pemakaian warna. *Visual images* bersifat sangat natural, sangat mewakili realitas, yang membuat erat muatan ideologi pesan dengan khalayak.⁵⁹

Pada struktur *reasoning device* yang terdiri dari bagian roots atau analisis kausal dan *appeals to principle* (klaim moral) menitik beratkan pada aspek pembenaran terhadap cara melihat sebuah isu atau peristiwa. Dua bagian pada *reasoning device* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Roots* adalah analisis kausal atau sebab akibat yang menunjukkan pembenaran isu atau peristiwa dengan menghubungkan suatu objek atau lebih yang dianggap menjadi sebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain.⁶⁰ Berdasarkan dengan adanya hubungan yang saling berhubungan dan menunjukkan adanya keterkaitan tersebut maka dapat menyimpulkan pembenaran sebuah fakta yang ada.
- b. *Appeals to principle* berhubungan pada hal-hal yang bersifat klaim moral, prinsip dan dapat digunakan untuk meyakinkan khalayak pada sebuah *argument* atau sebuah pendapat yang disajikan pada teks berita atau pembenar dalam membangun berita. *Appeals to principle* merupakan pemikiran, prinsip atau klaim moral sebagai argumentasi pembenaran membangun berita *Appeals to principle* yang apriori, dogmatis, simplistic dan monokausal (nonlogis) bertujuan membuat

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

khalayak tak berdaya menyanggah argumentasi. Fokusnya memanipulasi emosi agar mengarah pada sifat, waktu, tempat, cara tertentu, serta membuatnya tertutup atau keras dari bentuk penalaran lain.⁶¹

- c. *Consequences* berarti suatu hasil atau konsekuensi atau efek yang dihasilkan dari sebuah bingkai.

Pada hakikatnya media massa adalah wahana diskusi tentang suatu masalah yang melibatkan tiga pihak, yaitu wartawan, sumber berita, dan khalayak. Ketiga pihak itu mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan diantara mereka terbentuk melalui operasionalisasi yang mereka konstruksi dan transmisikan.

Berbagai perangkat bahasa serta simbol yang digunakan dalam menuliskan sebuah berita berpengaruh terhadap makna yang dihasilkan. Elemen yang menandakan pemahaman seseorang terhadap suatu peristiwa mempunyai bentuk yang terstruktur dalam suatu aturan dan konvensi penulisan yang terwujud dalam pemilihan kata atau symbol tertentu.

Dengan *framing* kita juga bisa mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan hendak dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.

5. Sistematika Penulisan

⁶¹ *Ibid*

Pada skripsi ini, peneliti akan membagi kedalam empat bab, dimana bab I menjelaskan bagaimana kedua media cetak itu yaitu koran harian Tempo dan Media Indonesia dalam menulis berita yang berkaitan dengan kontroversi kasus hukum Soeharto pasca meninggalnya beliau. Dalam bab I ini, peneliti akan menguraikan tentang apa yang menarik dari berita adanya kontroversi kasus hukum Soeharto pasca meninggalnya beliau yang dimuat pada koran harian Tempo dan Media Indonesia yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikannya objek penelitian. Berbagai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini juga terdapat dalam bab I ini. Dalam bab I ini juga terdapat metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang peneliti akan gunakan dalam menganalisis berita kontroversi kasus hukum Soeharto pasca meninggalnya beliau

Selanjutnya pada bab II akan menjelaskan mengenai profil media yang menjadi objek penelitian yaitu Koran Kompas dan Media Indonesia, latar belakang mulai dari sejarahnya berdirinya kedua media tersebut sampai perkembangannya juga berada di bab ini.

Untuk kemudian bab III peneliti menjelaskan analisis data yang bahannya diperoleh dari kedua media cetak tersebut, berupa berita-berita yang berkaitan dengan pemberitaan kasus hukum Soeharto mulai tanggal 29 sampai 31 Januari 2008. pada analisa ini peneliti menggunakan analisis William A. Gamson untuk mengetahui bagaimana media cetak tersebut dalam mengkonstruksi peristiwa yang kemudian dijadikan sebuah berita untuk dikonsumsi khalayak.

Skripsi ini diakhiri pada bab IV yang terangkum dalam kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan peneliti ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh peneliti. Kemudian pada sub bab saran, peneliti akan berusaha memberikan alternatif penelitian kepada media tersebut dan pembaca penelitian ini.